

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Strategi Politik

Secara etimologi strategi politik memiliki dua kata terdiri dari kata strategi dan politik. Pada kata strategi disini memiliki sebuah makna yang mendiskusikan tentang teknik, taktik, cara agar meraih hasil yang sudah diharapkan. Sedangkan sebuah kata politik memiliki makna interaksi, hubungan antar pemerintah dengan rakyat yang didalamnya terdapat sebuah proses dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah keputusan yang memiliki ikatan bersama rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah dengan wilayah tertentu.<sup>1</sup>

Strategi Politik merupakan sebuah cara dan taktik yang dilakukan partai politik atau politisi untuk mendapatkan perhatian pemilih guna mempertahankan sumber-sumber kekuasaannya, dan perumusan atau pelaksanaan keputusan politik sebagai mana yang diinginkan.<sup>2</sup> Selain itu, strategi politik merupakan cara yang digunakan untuk merealisasikan atau mewujudkan cita-cita dari partai politik.

Sebuah strategi politik ini sangat diperlukan kecakapan komunikasi politik yang harus dimiliki, karena hal ini dapat sangat membantu dalam menghasilkan pemilih suara disaat pemilihan umum yang akan terjadi dalam waktu tertentu. Dalam strategi politik yang benar pasti akan menghasilkan citra yang baik juga kepada partainya dari masyarakat.<sup>3</sup>

Maka strategi dan politik jika digabung dapat disimpulkan dalam sebuah definisi sebagai dasar ilmu yang di dalamnya terdapat tentang teknik, taktik, cara yang dapat diolah dan dapat dikerjakan oleh politisi agar memperoleh sistem kekuasaan dengan membuat pertahanan dengan

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2016), 10.

<sup>2</sup> Fatimah, S, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu". *Jurnal Resolusi*, 1(1), (2018), pp 13-20, Retrieved from Diakses pada 5 November, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/240587-kampanye-sebagai-komunikasi-politik-fd6de7d9.pdf>.

<sup>3</sup> Fatimah, S., "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", 1(1), pp 13-20.

melakukan sebuah perumusan dan pelaksanaan pada keputusan politik yang dapat dilihat berdasarkan yang sudah diinginkan.

Adanya sebuah strategi politik dapat membuat perubahan, dalam memenangkan atau memperoleh jabatan harus berusaha dan bisa mewujudkan sebuah rencana dengan strategi politik yang sangat matang, biasanya strategi politik yang terlalu ambisius dan tanpa sebuah strategi akan menjadikan rakyat sebagai pihak yang akan bertanggung jawab. Maka disini yang harus dilakukan dengan hal yang terpenting harus bisa mengenal dan dapat mengetahui strategi komunikasi yang tepat agar bisa mewujudkan yang sudah diinginkan.<sup>4</sup>

Analisis sistem politik menurut David Easton, ada tiga hal dalam sistem politik yang memiliki hubungan dengan komunikasi politik dalam pengalokasiannya bersifat paksaan dan mengikat secara keseluruhan: *Pertama*, Sistem politik harus saling keterkaitan, ketergantungan didalamnya yang menunjukkan koherensi satu sama lain. *Kedua*, Sistem politik bersifat netral. *Ketiga*, Sistem politik mengarah pada *co-variance* dan ketergantungan yang membentuk sistem politik tertentu.

Perubahan salah satu ketergantungan dalam sistem politik dapat mempengaruhi yang lain. dalam bukunya "*the political system*" David Easton memuat konsep input dan output politik, tuntutan dukungan serta umpan balik dari keseluruhan sistem politik yang saling berhubungan diantaranya bisa melihat gambar alur strategi komunikasi pada gambar dibawah ini :<sup>5</sup>

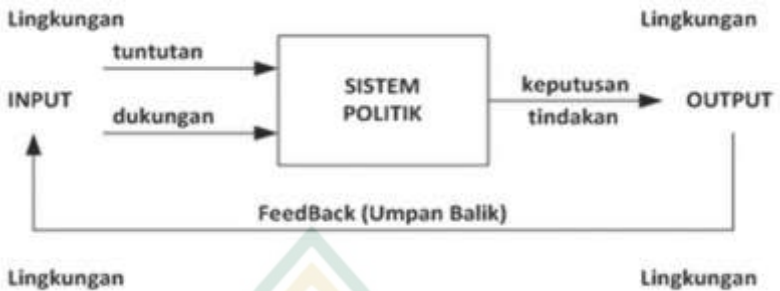
Gambar 2.1, sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/2772/Bab2.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 11.00 WIB.

<sup>5</sup> Asep Saeful Muhtadi dan Zaenal Mukarom, *Komunikasi Politik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 71-72.

**Gambar 2.1 Konsep Sistem Politik Menurut David Easton.<sup>6</sup>**



Gambar 2.1 menunjukkan bahwa unsur sistem politik diatas secara umum ada *input*, proses, *output*, *feedback* dari masyarakat dan lingkungan. *Input* dalam sistem politik terdapat tuntutan dan dukungan, *input* berupa tuntutan yang muncul dalam sumber kebutuhan masyarakat yang sangat langka. Adapun *input* berupa dukungan dari luar dan dari dalam seperti berupa pandangan atau pikiran seseorang atau orang lain dan partai politik untuk bertindak. Oleh karena itu sistem komunikasi menjadi hal yang paling penting di negara demokratis.

Adapun *output* yang memiliki keputusan otoritatif dalam memenuhi *input* yang masuk. *Output* menjadi mekanisme dukungan untuk memenuhi tuntutan dari sistem politik. *Input* yang masuk baik tuntutan maupun dukungan dapat mempengaruhi lingkungannya. Selain itu, keinginan dan kemampuan sistem politik dalam melaksanakan dan mengelola *input* yang masuk dapat mempengaruhi lingkungan itu sendiri. Tetapi tidak semua lingkungan termasuk pada sistem politik, baik dari lingkungan luar sistem politik tersebut.

Teori dan konsep yang diterapkan pada strategi politik ini dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis bagaimana strategi politik yang dilakukan oleh dr. Hj. Esti'anah, S.E dalam proses pemenangan sebagai bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2020.

<sup>6</sup> Asep Saeful Muhtadi dan Zaenal Mukarom, *Komunikasi Politik*, 73.

## 2. Teori Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

### a. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Sejarah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang seringkali disingkat dengan Pilkada atau Pemilukada memiliki cerita yang sangat panjang. Adanya sebuah pemilihan kepala daerah menjadikan masyarakat di daerah dapat secara bebas dan langsung dalam mendukung maupun memilih calon yang sedang berkompetisi dalam Pilkada untuk menjadi kepala daerah.<sup>7</sup>

Pilkada salah satu dari sebuah proses demokrasi yang ada di tingkat lokal yang mana memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pilkada merupakan sarana dari kegiatan politik lokal yang berada di daerah yang pelaksanaannya di atur dalam undang-undang No. 2 tahun 2011 yang kemudian ada perubahan lalu direvisi dengan undang-undang No 07/2017 tentang pemilihan umum yang di dalamnya terdapat mengatur pada pemilihan kepala daerah.<sup>8</sup> Pandangan lain tentang pilkada merupakan salah satu bentuk dengan sebuah kebutuhan yang memiliki tujuan untuk mengoreksi saat terjadinya sebuah penyimpangan dalam menerapkan otonomi daerah yang ditunjukkan kepada para elit yang ada di tingkat lokal.

Menurut buku yang berjudul “Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,” Titik Triwulan menjelaskan 4 pengertian dari pemilihan langsung berdasarkan pandangan yang menurut para ahli<sup>9</sup> :

#### 1) Menurut M. Rusli Karim,

*“Pemilihan menjadi salah satu media atau sarana utama yang dapat dipakai untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), dengan fungsi sebagai alat untuk menyetatkan dan*

<sup>7</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 273-274.

<sup>8</sup> Agus Prasetya, “Preferensipolitik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di kota Madiun,” *Jurnal Pamotor*, no. 2 (2018):12, diakses pada tanggal 26 Desember 2021, <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>.

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 331-332.

*menyempurnakan demokrasi, bukan untuk mencapai tujuan demokrasi.”*

2) Menurut Kusnadi dan Harmaily Ibrahim

*“Pemilu merupakan salah satu dari hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, dikarenakan hak asasi itu dalam perelealisasinya dengan suatu keharusan untuk pemerintah dalam melaksanakan pemilu. Berdasarkan asas yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang menjalankan kedaulatan maka semua itu dikembalikan lagi kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.”*

3) Menurut A.S.S. Tambunan

*“Pemilihan umum merupakan media atau sarana dalam melaksanakan asas kedaulatan rakyat dengan hakikat pengakuan dan perwujudan untuk hak-hak politik rakyat dan sekaligus pendelegasian hak-hak oleh rakyat yang ditunjukkan kepada wakil yang sudah terpilih untuk menjalankan sebuah pemerintahan.”*

4) Menurut Parulian Donald

*Berdasarkan pandangan salah satu ahli ini yang memiliki perbedaan dengan pandangan para ahli di atas, beliau menyatakan bahwa, “Pemilu memang bukan segala-segalanya untuk menyangkut demokrasi. Pemilu merupakan media dan sarana untuk pelaksanaan asas demokrasi pada sendi-sendi demokrasi yang juga bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bisa dilihat dari sudut manapun, pemilihan umum memiliki arti yang sangat penting dalam proses jalanya sebuah dinamika Negara.”*

Berdasarkan pengertian pemilihan kepala daerah di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa pilkada merupakan sebuah sarana dalam kegiatan demokrasi yang berada di tingkat lokal yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat yang berada di tingkat daerah yang memiliki tujuan untuk menentukan pilihan dari pasangan calon kepala daerah yang sudah diusulkan baik dari sebuah partai politik, juga bisa bersifat perseorangan bahkan juga bisa dari beberapa gabungan partai politik atau partai tersebut berkoalisi yang di dasarkan pada asas pemilihan yang sifatnya langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil agar terdapat pemilihan dengan terciptanya suatu pemilihan yang sangat demokratis.

**b. Mekanisme dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

Pemilihan kepala daerah memiliki mekanisme yang bisa membuat mekanisme tersebut dalam penyelenggaranya agar dapat demokratis dengan syarat sudah memenuhi beberapa parameter dalam pilkada. Peneliti mengutip dari pendapat Roberth Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powell. Adapaun parameter untuk mengamati dalam terwujudnya sebuah demokrasi harus melihat<sup>10</sup> :

- 1) Prosedur pemilihan umum yang dilaksanakan secara rutin dengan melakukan rekrutmen untuk mengisi sebuah jabatan politik dengan hasil penentuannya harus melalui pemilihan umum yang memiliki kriteria dan ketentuan dalam setiap penyelenggaranya dengan sangat teratur yang didalamnya terdapat batasan dari segi waktu yang sudah pasti, harus kompetitif, jujur, dan adil. Sebuah lembaga bisa terbentuk dengan harus melakukan pemilu yang sifatnya demokratis, karena bisa disimpulkan dalam pengisian jabatan harus melewati proses demi proses sehingga bisa menetapkan dalam pengisian dalam jabatan. Setelah ditetapkan dan sudah selesainya tahapan sebuah dalam pemilu maka pejabat yang terpilih harus melaksanakan tugasnya, tetapi disini masyarakat harus melakukan penilaian tentang kinerja pejabat dan bagaimana janji-janji yang sudah dibuat yang akan dipenuhinya dalam program masa jabatannya, penilaian tersebut akan dijadikan sebuah bekal untuk memberikan *reward* pada pemilu yang akan diadakan di masa mendatang.
- 2) Adanya sebuah kejadian dalam perputaran kekuasaan yang di dalamnya dapat menggambarkan sebuah kondisi yang mana jabatan dalam politik tidak bisa secara terus menerus dapat dipegang oleh satu orang

---

<sup>10</sup><http://kpu-mesuji.go.id/2016/09/28/pengertian-pemilihan-kepala-daerah-secara-langsung-parameter-demokrasi-pilkada.html> diakses pada tanggal 13 Januari, 2022 pukul 12.01 WIB.



dan partai politik itu saja. Maka pada sebuah sistem monarkhi ketika seseorang atau partai politik yang bisa berkuasa dalam waktu ke waktu di dalam pemerintahan bisa menyebabkan dianggap kurang layak, karena sistem yang harus demokratis itu dapat memberikan kesempatan dalam menjabat dengan secara teratur dan damai dari masa jabatan kepala daerah satu ke kepala daerah yang lain dengan juga dari partai politik satu ke partai politik yang lain.

- 3) Mekanisme rekrutmen yang harus dilakukan yaitu dengan cara terbuka agar memberikan kesempatan untuk saling berkompetisi yang dilaksanakan secara bebas dan bisa bertanggungjawab, karena semua orang dan kelompok tertentu memiliki hak dan peluang yang sama. Sehingga dalam proses pelaksanaan pengisian jabatan politik semua orang mendapatkan peluang yang sangat terbuka dengan syarat dan ketentuan yang sudah dibuat untuk berkompetisi dengan aturan yang telah disetujui dan resmi.

#### **c. Manfaat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

Adapun manfaat dari pilkada bisa dijadikan salah satu alat atau sarana yang di dalamnya memiliki tujuan untuk pembentukan dari perwakilan publik yang nantinya akan rakyat dapat juga memilih secara langsung dengan bisa mengemban amanah dan dapat menjadi wakil di pemerintahan yang dapat menyampaikan dan bisa memperjuangkan sebuah aspirasi kepentingan rakyatnya yang sudah memilih dan memenangkan, sehingga pilkada sebagai sebuah alat untuk bisa pemegang kekuasaan politik agar bisa untuk memperoleh legitimasi. Hal ini dan secara manfaat memiliki arti suara rakyat merupakan sebuah mandat yang akan dijadikan sebuah nilai legitimasi yang terdapat keabsahan bagi para pemimpin politik guna untuk menjalankan sebuah amanah dalam melaksanakan di pemerintahan.

Pemilihan umum bisa juga dijadikan sebagai sarana dan alat sebuah partisipasi politik masyarakat, yang mana pasrtisipasi tersebut menjadikan langsung untuk mendukung dan bisa menetapkan melalui hak pilih suara. Kemudian bagi seorang pemimpin politik yang sudah terpilih harus

bisa memenuhi janji-janji yang sudah dilakukan saat kampanye dengan harus ada pembuktian dan perealisasi.<sup>11</sup>

### 3. Teori Suksesi Kepemimpinan

Istilah kata suksesi yang diambil dari kata bahasa Inggris ‘*succession*’ atau Latin ‘*succeio*’, yang memiliki arti penggantian, urutan, dan pewarisan.<sup>12</sup> Kepemimpinan sering menimbulkan permasalahan dalam proses peralihan suatu kepemimpinan yang biasa dikenal dengan *Suksesi Kepemimpinan*. Dalam sebuah suksesi kepemimpinan yang agar diketahui bagaimana agar bisa mendapatkan seorang calon pemimpin yang mengetahui bahwa pemimpin memiliki sebuah makna seorang pemimpin itu *pelayan*.<sup>13</sup> Suksesi juga bisa diartikan dalam proses sebuah perubahan yang berlangsung satu arah, jadi suksesi secara jelas dapat didefinisikan sebagai penggantian kepemimpinan dari suatu negara, maka sebuah kepemimpinan tidak harus terus dipertahankan.

Adapun definisi dari kepemimpinan sendiri menurut Jacobs & Jaques mendefinisikan dengan suatu proses yang mampu memberikan arti terhadap suatu usaha dengan mengakibatkan ketersediaan guna untuk melakukan sebuah usaha yang sudah diinginkan guna untuk mencapai sasaran. Bisa kita ketahui dalam Islam kepemimpinan memiliki sebutan imamah, selain itu juga bisa menyebut dengan khalifah yang memiliki sebuah arti penguasa atau pemimpin yang tertinggi di rakyat.<sup>14</sup>

Mengenai syarat kepemimpinan terdapat empat hal yang sangat paling utama yang harus diketahui yaitu<sup>15</sup>: *Pertama*, kekuasaan merupakan sebuah kekuatan, otoritas dan legalitas yang bisa memberikan wewenang kepada pemimpin untuk bisa mempengaruhi dan dapat menggerakkan setiap bawahan dengan berbuat sesuatu hal.

---

<sup>11</sup> Artikel diakses pada tanggal 14 Januari, 2022 pukul 12.32 WIB dari <https://seputarilmu.com/2020/10/pilkada-adalah.html>.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hal 553, Arieff.S,(ed), *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, th), 404, Peter.

<sup>13</sup> Artikel diakses pada tanggal 13 Januari, 2022 pukul 13.20 WIB dari <http://andreysubiantoro.viviti.com/entries/rekiblik/suksesi-kepemimpinan>.

<sup>14</sup> Gary Yuki, *Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Jakarta: Prenhallind, 2014).

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal itu?* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 28-31.



*Kedua*, Kewibawaan merupakan kelebihan, keunggulan, sebuah keutamaan dan sehingga orang bisa mengatur orang lain dengan patuh kepada pemimpin dengan siap bersedia melakukan segala perbuatan tertentu. *Ketiga*, kemampuan merupakan segala bentuk dari sebuah kesanggupan, kekuatan, dan ketrampilan yang bentuknya teknis mamupun sosial yang bisa dianggap untuk melebihi dari suatu kemampuan. Keempat, memiliki dukungan dari berbagai kelompok kepentingan salah satunya gabungan dari partai politik, bahwa kehadiran suatu koalisi partai politik terutama untuk memfasilitasi berbagai upaya dari anggota koalisi untuk mewujudkan kepentingan bersama yang telah disepakati.<sup>16</sup> Kerjasama tersebut dapat terjadi pada saat kampanye politik menuju pemilihan umum yang secara mendasar mengarah pada suatu upaya gerakan bersama dimana kekuatannya diperoleh melalui aksi bersama dengan alasan kepentingan yang diperjuangkan dalam sebuah bentuk dukungan.<sup>17</sup>

Teori pada suksesi kepemimpinan ini serta konsepnya dapat digunakan untuk melihat dan bisa juga untuk menganalisis peran, fungsi, status dari sebuah bentuk kontruksi sosial pada bupati terpilih dalam ranah kehidupan sosial politik di Kabupaten Demak dengan memperhatikan semenjak munculnya di dunia politik sekaligus dapat juga menganalisis bagaimana suksesi kepemimpinan yang digunakan oleh bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2020 yang di dalamnya terdapat strategi dan faktor pendukungnya.

#### **4. Teori Politik Ashabiyah Ibnu Khaldun**

##### **a. Teori Politik Ashabiyah**

Abu Zaid Abdul Rahman Ibn Muhamad Ibn Khaldun Wali Al Din Tunisi Al Hadramain yang lahir di Tsunia pada tanggal 1 Ramadhan 732 Hijriah atau 7 Mei

---

<sup>16</sup> Saputra, R., *Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap anak Muda)*. Univeersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta . (2) 1, (2019), 54.

<sup>17</sup> Firmanzah, *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*. Jurnal Resolusi, 1(1), pp 13-20. Retrieved from, 2008, 69 di Akses pada 20 Oktober, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/240587-kampanye-sebagai-komunikasi-politik-fd6de7d9.pdf>.

1332 Masehi.<sup>18</sup> Beliau dibesarkan dan dididik dengan keluarga yang ahli dalam sebuah bidang ilmu pengetahuan dan politik.

Negara Afrika Utara sebagai tanah air Ibnu Khaldun dalam menyaksikan sebuah pertumbuhan dan kemunduran, pada abad ke 14 terdapat kemunculan dengan tanda sebuah kekacauan politik sudah mulai terlihat. Permasalahan ini juga terjadi pada kekuasaan muslim Arab yang telah jatuh sehingga terdapat banyak negara bagian untuk pisah atau melepaskan negaranya dari pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan sebuah pertentangan, perpecahan dan kericuhan yang sangat luas pada saat itu dalam sebuah kehidupan politik dengan setiap orang tetap berusaha untuk mendapatkan sebuah kekuasaan.<sup>19</sup>

Langkah perjalanan Ibnu Khaldun bisa diketahui telah melaksanakan pengabdian di pemerintah dengan sistem pemerintah satu ke pemerintah lain dan yang didapatkan selama mengabdikan Ibnu Khaldun sudah bosan dan lelah pada petualangan yang di dapatkan khususnya dalam politik. Hal tersebut Ibnu Khaldun juga mencari dukungan dengan meminta dari para suku untuk mendukung lebih banyak dengan memanfaatkan sebuah kesempatan untuk meninggalkan dalam politik dengan meminta bantuan pada Banu Arif. Maka disamping itu terjadilah Ibnu Khaldun menulis buku *Muqaddimah*<sup>20</sup> yang di dalamnya juga terdapat *ashabiyah* yang mana buku atau kitabnya tersebut sudah terkenal dan bisa dipahami masyarakat secara luas dalam sebuah landasan teori.

Karya Ibnu Khaldun *Muqaddimah* yang ditulis sesuai pengalaman dengan pemikiran yang sangat realistis bahkan bisa dibuat sebagai dasar utama teori dalam sebuah penelitian. *Muqaddimah* tersebut dijadikan sebuah pedoman dalam aktivitas politik yang

---

<sup>18</sup> Muhammad Abdullah Enan, Biografi Ibnu Khaldun Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia, terj. Machnun Husein, (Jakarta: Zaman, 2013), 14-15.

<sup>19</sup> Fuad Ali dan Ali Wardi, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam, (Jakarta: CV Pustaka Firdaus, 2012), 9.

<sup>20</sup> Antony Black, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 306.

mana suatu hal yang sangat penting dan masih digunakan sampai sekarang ini, secara garis besar dalam teori politik ini terdapat suatu golongan yang di dalamnya mengalami sebuah atau konflik yang dapat diselesaikan dengan memiliki dan bisa mencapai tujuan yang sama di golongan tersebut. Karya buku yang di tulis Ibnu Khaldun tersebut sebuah karya yang bisa dilihat dengan berbagai perspektif melalui sudut pandang oleh Ibnu Khaldun.

Secara etimologis *ashabiyah* berasal dari kata *ashaba* yang memiliki arti mengikat.<sup>21</sup> Secara fungsional *ashabiyah* dapat diartikan sebagai penunjuk pada sebuah ikatan dalam budaya yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah kekuatan kelompok sosial.<sup>22</sup> Dari berbagai pandangan termasuk penulis, *ashabiyah* sangat berarti untuk menentukan pemenangan dalam proses perebutan kekuasaan. Disisi lain *ashabiyah* ini memiliki ikatan dalam sosial budaya yang mana bisa digunakan untuk mengukur kelebihan dan kekuatan dalam kelompok sosial.<sup>23</sup> Selain itu Ibnu khaldun juga membahas tentang pemikiran *ashabiyah* terdapat kesamaan dengan konsep persaudaraan seperti saling bekerjasama. Disamping itu *ashabiyah* juga bisa dipahami sebagai solidaritas sosial dengan tekanan pada kesadaran, kesamaan dan persatuan kelompok. Bisa dikatakan *ashabiyah* dapat menentukan sebuah pemenangan dan keberlangsungan pada dinasti atau pemerintahan. Maka persoalan tersebut tanpa dibarengi solidaritas sosial, maka keberlangsungan dan eksistensi dalam meraih kekuasaan akan sulit terwujud.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Muh. Ilham, "Konsep Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun", Jurnal Politik Profetik Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, 4 no.1 (2016):4-5 Diakses Pada 14 Desember, 2021, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jia/article/view/509/459>.

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana. 2014), 49.

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, 49-50.

<sup>24</sup> Taufiq Hidayatullah, Ibnu Khaldun, Konsep Ashabiyah dan Teori Siklus Pemerintahan, artikel ini di akses pada tanggal 23 Oktober 2021, <https://archivehidayatillah.wordpress.com/2012/01/28/ibnu-khaldun-konsep-ashabiyah-dan-teori-siklus-pemerintahan/>.

Konsep *ashabiyah* dalam politik merupakan hasil dari sebuah bukti ketelitian Ibnu Khaldun dalam menganalisis tentang politik dan negara. Perspektif politik *ashabiyah* merupakan sebuah kunci yang harus didapatkan dalam awal sebuah terbentuknya negara. Keterlibatan unsur pada *ashabiyah* di dalam suatu negara menjadi sebuah inspirasi tersendiri dalam melakukan pergerakan politik di masa kontemporer.

Salah satu teori yang Ibnu Khaldun tulis di dalam karya bukunya yaitu teori politik *ashabiyah*. Menurutnya *ashabiyah* (solidaritas sosial) merupakan hasil dari sampingan penyerangan atau sebuah agresi yang tidak terbatas terhadap pada bangsa arab saja tetapi juga terhadap pada Yahudi, Siria, Yunani, dan Romawi.<sup>25</sup> Bisa diketahui, Ibnu Khaldun hidup dikalangan orang-orang *nomad* (hidupnya berpindah ke tempat satu ke tempat lain) dan mengamati transisi (terutama melalui agresi) dari *nomadisme* (perpindahan terus menerus) dan *hadarah* (peradaban atau hidup menetap). Disini terdapat perselisihan antara kaum *nomad* dengan masyarakat yang hidup menetap yang mengakibatkan jatuh bangunya sebuah siklus pada sebuah dinasti dalam proses setiap tahapan baru yang akan muncul dari kontradiksi yang berkonflik pada tahap sebelumnya.

Perubahan pada dinasti ini bisa terjadi karena hubungan dialektis yang kompleks antara masyarakat dan faktor *ashabiyah*. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dalam memimpin hanya dapat dilaksanakan dengan sebuah kekuasaan, maka seorang pemimpin harus bisa mempunyai solidaritas kelompok yang kuat. Tanpa solidaritas kelompok yang kuat, maka seorang pemimpin akan sulit memperoleh legitimasi dan tidak akan dapat bertahan memimpin dalam kelompok tersebut.<sup>26</sup> Karena itu, Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa kuat atau lemahnya suatu Negara (dinasti) sangat

---

<sup>25</sup> Suyudi, “*Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia*”, (Sikripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta, 2014), 1.

<sup>26</sup> Agus Sutisna, “Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah”. *Jurnal Politik*, 2, no 1 (2017):35 Diakses pada tanggal 1 November 2021 <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>.

tergantung pada perasaan yang dimiliki pada solidaritas kelompok ini. Semakin tinggi *ashabiyah*, maka semakin kuat dinasti didalamnya. Tetapi sebaliknya, bila *ashabiyah* sudah melemah, maka dinasti atau Negara itupun akan mengalami sebuah kelemahan.

Teori *ashabiyah* memiliki solidaritas kelompok yang kuat, teori ini muncul karena terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dengan cara dilihat dari pertalian kaum dan rasa cinta seseorang terhadap kelompoknya yang menimbulkan rasa untuk menjalin sebuah kerjasama dalam berbagai bidang. Selain itu, *ashabiyah* juga melahirkan persatuan dan pergaulan di antara mereka. Bisa dilihat sampai sini, teori ini akan menyebabkan penguasa akan memilih orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa kedalam jajaran struktur pemerintahanya.

Politik *ashabiyah* Ibnu Khaldun terdapat beberapa macam istilah pengertian yang dibagi menjadi:<sup>27</sup>

- 1) *Ashabiyah* memiliki arti positif dengan menunjuk pada sebuah konsep persaudaraan

Konsep ini dapat membentuk sebuah solidaritas sosial masyarakat dengan memiliki tujuan khusus untuk saling kerjasama dengan mengesampingkan urusan atau kepentingan pribadi dan harus bisa mencapai dalam memenuhi kewajiban antar sesama. Hal ini bentuk dari semangat untuk mendorong terciptanya keselarasan sosial dengan adanya perasaan itu muncul dari hubungan kekeluargaan, maka masyarakat yang memiliki kesamaan kesukuan atau ideologi harus memiliki sentimen kelompok atau *ashabiyah*.

- 2) *Ashabiyah* dengan Konsep tentang Negara

Tindakan ini terdapat negara adalah bentuk sempurna dari *ashabiyah*, sebagaimana anggapan banyak orang merupakan objek kajian utama *muqadimah*. Karena negara adalah ‘’bentuk’’ sempurna dari *ashabiyah*. Ibnu Khaldun memang menekankan adanya kekuatan yang memaksa dalam

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana. 2014), 50.



suatu kelompok yang memiliki *ashabiyah* untuk menjadi *dawlah* satu kekuatan politik yang mendominasi pihak lain. Sebaliknya, karena keberadaan *ashabiyah*lah sebuah *dawlah* yang dapat diterima kelompok dan terutama *klan* yang terkemuka, tergantung sepenuhnya pada *ashabiyah* mereka demi mewujudkan cita-cita untuk mencapai kekuasaan politik

**b. Tujuan Politik *Ashabiyah* Ibnu Khaldun**

Solidaritas golongan yang kuat menjadi tujuan utama dari *ashabiyah*. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan dan keniscayaan (*zarruah*). Tujuan yang paling bisa dilihat yaitu untuk memperoleh kekuasaan.<sup>28</sup> Maka yang harus diperhatikan oleh rakyat (*kabilah*) yang harus mengikuti *ashabiyah* adalah dari kelompok ini dengan melakukan bantuan dengan cara apapun untuk terwujudnya sebuah kekuasaan yang dikehendaki. Ini dilakukan dengan cara mendapatkan dukungan dari solidaritas kelompok yang sangat kuat, dengan memperhatikan, dan memberikan perlindungan, serta rasa aman bagi kelompok solidaritasnya. Tujuan hal ini dilakukan adalah untuk mencapainya sebuah keberhasilan dalam apa yang dapat diraih seperti pemilihan kepala daerah yang perlu membutuhkan banyak dukungan dari sebuah kelompok yang kuat untuk mencapai kemenangan. Teori ini dalam kekuasaan politik yang tidak didukung oleh kelompoknya yang sangat kuat dapat dipastikan akan mengalami distorsi dan guncangan dalam aktivitas politik.

Tugas dari *ashabiyah* sendiri di kehidupan masyarakat menurut Ibnu Khaldun sudah dominan. *Ashabiyah* telah menjadi alat dalam kekuasaan, karena dapat menjadi sebuah penggerak yang utama. Ibnu Khaldun memiliki berbagai pandangan dengan tujuan *ashabiyah* untuk mewujudkan *al mulk* dan mampu memberikan perlindungan serta dapat menumbuhkan

---

<sup>28</sup> Zuhriani, “Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila”, Jurnal Al Adalah, 1 no. XII (2014): 174-179, di Akses Pada Tanggal 4 Desember, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/5775-ID-kontribusi-nomokrasi-islam-rule-of-islam.pdf>.

sebuah rasa aman dan memiliki rasa tenang untuk bersama. Maka *ashabiyah* dapat diartikan sebuah superioritas dengan kekuatan yang sangat dominan dalam membentuk dan memenangkan sebuah kepentingan.

*Ashabiyah* terdapat juga persatuan dan sebuah pergaulan antara sesama mereka dengan dasar utama penguasa memiliki sebuah strategi untuk memilih orang yang berpotensi dengan memiliki hubungan kepada penguasa di dalam jajaran pemerintahannya.

Penulis dalam kerangka teori ini mengutip dari pendapat Ibnu Khaldun mengenai Politik *Ashabiyah* diantaranya:<sup>29</sup>

#### 1) Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial bisa diperoleh pada suatu golongan yang memiliki sebuah ikatan pertalian darah atau pertalian lain dengan mempunyai kesamaan arti dalam ikatan. Hal ini karena pertalian memiliki kekuatan yang mengikat dengan sesama umat manusia yang bisa menyebabkan terdapat rasa yang sama antara yang satu dengan yang lain dengan memiliki rasa kepedulian.

Disini solidaritas sosial memiliki sistem kekeluargaan antara kedua orang yang saling membantu yang sifatnya dekat sekali, maka sudah jelas ikatan kekerabatan sesuai dengan solidaritas yang sesungguhnya. Apabila pada tingkat kekeluargaan atau kekerabatan ini jauh, maka sebuah ikatan itu semakin jauh atau sangat melemah. Tetapi untuk gantinya dalam sebuah masalah tersebut terdapatnya gantinya dengan perasaan kefamilian yang pada dasarnya terdapat pengetahuan yang lebih luas terhadap persaudaraan. Bisa disimpulkan setiap manusia hanya ingin membantu kepada orang lain karena ada rasa khawatir dan takut apabila gagal dalam memperoleh kekuasaan dengan tetap menjaga nama baik persaudaraan.

---

<sup>29</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Penerjemah Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), 214.

## 2) Kedudukan Solidaritas Sosial

Selanjutnya untuk menghindari kekalahan dapat diperoleh dengan bantuan solidaritas kelompok yang banyak. Sebab kemenangan berpihak pada solidaritas yang kuat dengan mempunyai banyak anggota yang sanggup berjuang untuk sebuah kepentingan bersama. Disini kekuasaan mejadi ajang perebutan dan jarang sekali dilepaskan begitu saja dengan suka rela, sebaliknya hal tersebut selalu dipertahankan dari berbagai macam cara atau sebuah strategi dalam memenangkan kekuasaan.<sup>30</sup>

## 3) Solidaritas sebagai Kedaulatan

Solidaritas merupakan dasar sebuah kedaulatan, karena solidaritas itu sendiri bisa membuat orang untuk berusaha bersatu dalam memperoleh dan bisa mendapatkan tujuan yang sama untuk mempertahankan diri dengan mengalahkan lawan yang dilakukan bersama. Orang-orang yang memiliki solidaritas sosial yang tinggi mereka mejadi pelindung untuk memenangkan yang sudah dibangun para pendahulunya untuk menjaga pendukung pendahulunya yang sudah dicintai oleh masyarakat.<sup>31</sup>

Adapun pandangan Ibnu Khaldun di atas dapat disimpulkan bahwa adanya solidaritas kelompok bisa efektif dengan mengendalikan dan melindungi dari berbagai ancaman untuk mendapatkan kekuasaan harus bisa bertahan dalam solidaritas kelompok.

Solidaritas kelompok dapat membentuk para pengikut dalam berpolitik dengan membentuk sebuah kekuasaan. Disini peran solidaritas kelompok sangat penting, karena seseorang memiliki strategi untuk ingin menyatukan sebuah usaha dengan tujuan yang sama maka sangat dibutuhkan banyak sedikit paksaan dengan jumlah masa yang sangat banyak, maka hal tersebut solidaritas bisa dikatakan awal dari

---

<sup>30</sup> Charles Issawi, Filsafat Islam tentang Sejarah: Pilihan dari Karangan *Muqaddimah* Ibn Khaldun dari Tunis 1332-1406, (Jakarta: Tintamas, 2017), 147-148.

<sup>31</sup> Masturi Ilham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri, Sebuah Karya Mega Fenomena dari Cendekiawan Muslim Abad Peretengahan Ibnu Khaldun *Mukaddimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 69.

sebuah untuk terbentuknya dan berdirinya kekuasaan.<sup>32</sup>

Maka peneliti menyimpulkan tujuan akhir dari *ashabiyah* adalah pembentukan pemerintahan (*mulk*), sesungguhnya dalam kelompok apapun yang memiliki sentimen kelompok atau *ashabiyah* suatu orang di antara mereka pasti akan muncul sebagai kekuatan pengendali, ia dapat memaksa orang lain untuk bisa menerima keputusannya.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dasar yang berupa teori atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan sebagai acuan atau data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penulis perlu dijadikan bagian tersendiri adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti seperti:

*Pertama*, Dinasti Politik: Perspektif Teori Politik ‘*Ashabiyyah* Ibnu Khaldun (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Banten 2007-2014. Peneliti Anwar Saputra tahun 2017. Hasil penelitiannya peneliti berfokus pada faktor apa saja yang mendukung terjadinya dinasti politik di Banten dengan melihat pada dinasti politik menurut teori *ashabiyah* Ibnu Khaldun. Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data atau informasi, studi pustaka dan dokumen. Juga terdapat sumber data primer yang diperoleh dari observasi yang sifatnya tertulis dan data sumber sekunder lanjutan dari data primer berupa dokumentasi. *Kedua*, Kekuasaan dan Legitimasi Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun. Peneliti M Rudianto tahun 2018. Hasil penelitiannya mendeskripsikan pemikiran politik Ibnu Khaldun yang fokus pada objek penelitiannya mengenai kekuasaan dan legitimasi dalam kaca mata politik Islam dengan melihat riwayat kehidupan dan pemikiran politik Ibnu Khaldun. Metode pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan memperoleh datanya seperti buku, jurnal dan website. *Ketiga*, Etika Politik Ibnu Khaldun (Analisis Terhadap Konsep

---

<sup>32</sup> Munawwir Syadzli, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Pres, 2010), 105.

Kepemimpinan dalam Muqaddimah). Peneliti Muflih Fahmi Kaunain, S.IP tahun 2017. Hasil penelitiannya berfokus pada konsep etika politik kontemporer dalam sebuah kitab hasil karya Ibnu Khaldun yaitu kitab *Muqqadimah* yang mana mampu memberikan sebuah gambaran negara agar tidak menuju kehancuran dan bagaimana etika politik yang harus diterapkan oleh sebuah negara baik pemimpin maupun rakyatnya maka bisa dilihat dari kitab muqqadimah dengan adanya *ashabiyah* atau solidaritas kelompok yang sangat kuat. Metode pada penelitin ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mendeskripsikan gagasan primer yang menjadi obyek penelitian juga memberikan interpretasi yang telah dideskripsikan untuk menarik relevansi atau implikasi masalah yang akan diteliti.

*Keempat*, Ide Demokrasi dalam Konsep *Ashabiyah* Ibn Khaldun. Peneliti Muhammad Taufik tahun 2018. Hasil penelitiannya pada penelitian ini fokusnya dengan konsep *ashabiyah* sejalan dengan ide demokrasi dalam pengelolaan hidup bernegara dan bermasyarakat serta implementasi dalam konsep *ashabiyah* Ibn Khaldun dalam demokrasi di Indonesia. Metode pada penelietian ini menggunakan analistis deskriptif yang mana menjelaskan pada objek materi yang akan dibahas. Sumber data pada penelitian ini juga menggunakan data primer dengan menggunakan literature klasik *muqqaddimah* Ibn Khaldun yang secara akademis telah dipadndang otoritatif.

*Kelima*, Konsep *Ashabiyah* Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Di Kota Bandar Lampung (Analisa Pemikiran Ibnu Khaldun). Peneliti Nurhayati tahun 2020. Hasil penelitiannya penelitin ingin menggunakan konsep *ashabiyah* untuk menjelaskan dinamika hubungan NU dan PKB. Penelitin ini terkait konsep *ashabiyah* dari pemikiran ibnu khaldun serta implementasi *ashabiyah* pada masa NU di Partai Kebangkitan Bangsa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data-data lapangan dalam penelitian ini dilakukan di DPC PKB Bandar Lampung dan PCNU Kota Bandar Lampung.

*Keenam*, Strategi Komunikasi Politik Partai Politik Dalam Menjaga Elektabilitas Calon Kepala Daerah. (Studi Pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB Kabupaten Sidoarjo). Peneliti Juang Abdi Muhammad tahun 2017. Hasil penelitian penelitin mencari bentuk strategi komunikasi politik partai kebangkitan bangsa dalam menjaga elektabilitas dan faktor-faktor strategi komunikasi politik dalam pilkada tahun 2015 di kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang



PKB kabupaten sidoarjo untuk mencari data langkah-langkah strategi komunikasi politik. *Ketujuh*, Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Peneliti Bowo Sugiarto, Oktaviani, Andi A Said Akbar tahun 2014. Hasil penelitiannya peneliti ini fokus pada analisis tentang strategi yang digunakan oleh Husen-Budhi dalam memenangkan pemilukada dan faktor konsektual yang mendukung kemenangan itu, meliputi area konsolidasi partai politik, segmentasi, tergantung, positioning, dan citra kandidat, sasaran kampanye, menggandeng berbagai elemen masyarakat sipil dan konsolidasi internal partai yang dilakukan dari proses kandisasi sampai kampanye dengan melibatkan calon anggota legislative. *Kedepalan*, Pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Pemilihan Walikota Probolinggo Tahun 2018. Peneliti Husni Mubarak tahun 2018. Hasil penelitiannya fokus dalam pemilihan kepala daerah 2018 kota probolinggo diwakili oleh pasangan calon dari PKB menuai keberhasilan dengan mengalahkan tiga pasangan calon lainnya. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemenangan PKB dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi, hasil analisis terdapat tiga strategi pemenangan yaitu strategi penguatan, strategi rasionalisasi, strategi bujukan dan strategi konfrontasi. *Kesembilan*, Kekuatan dan Strategi Politik dalam Pemilukada Analisis Terhadap Kemenangan Adnan Purichta dalam Pilkada Kabupaten Gowa, Peneliti Muhammad Ayub Liwang tahun 2016. Hasil penelitian Faktor pendukungnya dari pemenangnya adalah dukungan dari banyak koalisi partai politik. selain itu juga dapat kekuasaan yang digunakan oleh calon bupati ini yaitu identitas dari ayahnya mantan bupati yang menjabat selama dua periode. *Kesepuluh*, Strategi Pemenangan Pasangan Calon Walikota Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Pasangan Calon H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H dan TGH. Mujiburrahman. Peneliti, Rachman Sulthon Hidayat tahun 2021. Hasil Penelitian Pada pembahasan ini sangat menarik, karena seorang calon walikota adalah pertahanan, karena sebelumnya menjabat sebagai wakil walikota. Juga fokus dalam sebuah strategi pemenangan dalam ajang pilkada serentak dikota Mataram. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu berdasarkan diatas, dapat diambil kesimpulan terkait persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama fokus di Pemenangan bupati terpilih dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia sebagai pengusung atau koalisi partai politik serta tempat penelitian, tetapi penelitian tempat dilakukan berbeda tempat daerahnya. Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu lebih ingin mengkaji tentang kemenangan bupati terpilih saja yang memiliki kekuatan sebagai faktor pendukung. Selain itu juga sama-sama fokus nya ke pemilihan kepala daerah dan topik pembahasannya juga sama yaitu strategi kemenangan bupati terpilih studi terhadap politik *ashabiyah* Ibnu Khaldun.

Referensi utama menggunakan buku Antony Black yang berjudul *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* yang mana buku tersebut telah diterjemahkan oleh Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati tahun 2012. Kedua, buku Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution yang berjudul *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* tahun 2014. Ketiga, penerjemah kitab *Mukaddimah* tahun 2015 sebuah karya *Mega Fenomenal* dari cendekiawan muslim abad pertengahan Ibnu Khaldun oleh Masturi Irham, LC. Malik Supar, LC dan Abidun Zuhr, dan *Biografi Ibnu Khaldun Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia* karya Muhammad Abdullah Enan yang diterjemahkan oleh Machun Husein tahun 2013.

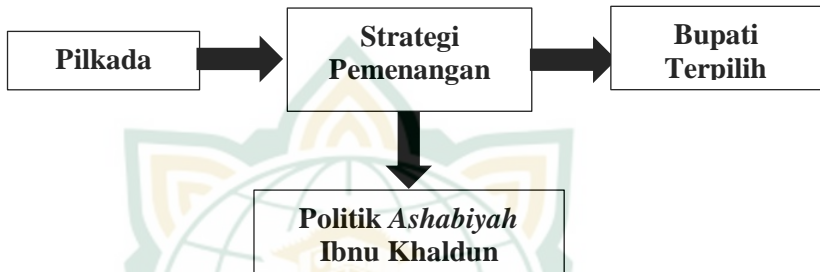
Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada pemilihan metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih metode kualitatif sehingga diharapkan dapat memperoleh data secara mendalam. Sedangkan pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan adalah antara lain; metode survey, deskriptif analitik. Selain itu perbedaan yang signifikan terdapat pada fokus penelitian.

Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan ini adalah strategi kemenangan pemilihan kepala daerah. Secara umum, penelitian ini juga berfokus untuk mengkaji bagaimana strategi kemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2020, apa faktor pendukung kemenangan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2020, dan bagaimana analisis strategi kemenangan bupati terpilih Kabupaten Demak dalam perspektif politik *ashabiyah* Ibnu Khaldun. Adapun adanya perbedaan ini diharapkan akan menimbulkan hasil yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir didefinisikan oleh Sugiyono sebagai model konseptual tentang bagaimana hubungan antar teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>33</sup> Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir**



Gambar 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pemilihan kepala daerah menggunakan sebuah strategi untuk bisa memperoleh kemenangan, sehingga ditetapkan sebagai bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Demak tahun 2020 yang selanjutnya di analisis menggunakan politik *ashabiyah* Ibnu Khaldun. Sedangkan hasil temuan dilapangan menunjukan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam kemenangan bupati terpilih yaitu disebabkan dengan adanya faktor internal dan eksternal yang sangat kuat dengan memiliki kekuatan solidaritas kelompok yang memiliki persamaan didalam sebuah ideologi.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 91.